



ANNUAL REPORT

PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN BERKELANJUTAN
UNTUK Mendukung percepatan pencapaian target
penurunan gas rumah kaca

PROVINSI RIAU
TAHUN 2025



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan	3
1. Detail Program/Proposal	4
2. Kemajuan Implementasi.....	4
2.1 Kinerja Program	4
2.2 Status Implementasi Keluaran Proyek	5
2.3 Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik	13
3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender	14
4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut	17
Lampiran	18

Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan

Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau pada Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang baik dan berjalan sesuai dengan kerangka implementasi yang telah direncanakan. Capaian utama pada periode ini meliputi fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) pada 9 (sembilan) kelompok masyarakat di beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta proses pembaruan dokumen Rencana Aksi REDD+ Provinsi Riau melalui pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) dan kegiatan sosialisasi program RBP.

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dan Yayasan Penabulu juga berhasil memperkuat tata kelola proyek serta memastikan bahwa pemantauan aksi mitigasi akan tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN). Secara umum, kegiatan berjalan tanpa kendala signifikan dan sebagian besar target antara berhasil dicapai.

Pada Tahun 2025 ini tercatat partisipasi sebanyak 270 orang, terdiri dari 204 laki-laki (76%) dan 66 perempuan (24%). Meskipun partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam sosialisasi penyusunan dokumen RKPS, serta kegiatan pertemuan Pokja.

Pekanbaru, 17 Maret 2026

Penanggung Jawab Kegiatan
Yayasan Penabulu



EKO KOMARA

Mengetahui,
Penanggung Jawab
Plt. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



M. JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
NIP. 19750528 199412 1 001

1. Detail Program/Proposal

1. Proyek	<i>RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2</i>	
2. Kategori	Kategori II: Kinerja ER pada 2014-2016	
3. Pelaksana	Provinsi	Riau
	Nama Lemtara	Yayasan Penabulu
	Nomor Perjanjian	525/DLHK-PPH/473 308/PK/PENABULU/VII/2024
	Periode Program	(2025 – 2028)
4. Periode Pelaporan	Tahun 2025	
5. Judul Proposal	Mewujudkan Riau Hijau Melalui Implementasi RBP GCF REDD+ Output 2	
6. Total Pendanaan Program/Kegiatan (Durasi Total)	(Rp) 32.244.502.628	
7. Total Dana yang Diajukan Tahun Berjalan (2025)	(Rp) 2.498.682.377	
8. Total Realisasi Dana Tahun Berjalan (2025)	(Rp) 427,888,539	

2. Kemajuan Implementasi

2.1 Kinerja Program

Berikut disajikan kinerja program proyek RBP REDD+ output 2 Provinsi Riau 2025.

No. Outcome program/ proposal	Output Rencana Investasi RBP REDD+ GCF Output 2					Outcome Rencana Investasi RBP REDD+ GCF Output 2			
	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OM1	OM2	OM3	OM4
Outcome 1. Menguatnya Pengelolaan Hutan Lestari melalui Peningkatan Tata Kelola KPH	■	■	■	□	□	■	■	■	□
Outcome 2. Meningkatnya akses untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan	■	■	□	□	□	■	■	■	□

Outcome 3. Mendukung Pencapaian Tingkat Emisi GRK	■	■	□	□	□	■	■	□	□
Outcome 4. Menguatnya Kebijakan dan kelembagaan Untuk Implementasi REDD+	□	□	□	■	□	■	■	■	■
Outcome 5. Penguatan dan implementasi NDC ditingkat Provinsi	□	■	□	□	■	■	□	□	■

2.2 Status Implementasi Keluaran Proyek

Implementasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau telah dimulai sejak tahun 2025 dan menunjukkan progres yang baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai pelaksana utama, dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan kerangka kerja Results-Based Payment (RBP).

Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun tidak seluruh rencana awal dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana dan sebagian lainnya justru dilaksanakan lebih awal kondisi ini merupakan bagian dari dinamika implementasi di tingkat tapak. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi capaian target utama. Sebagian besar kegiatan telah berhasil mencapai luaran yang direncanakan.

- Implementasi output 1.1, dalam rangka penguatan perencanaan KPH dalam pengelola hutan, telah dilakukan serangkaian kegiatan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS). Pada Kuartal III (Q3) tahun 2025, pertemuan antara KPH dan masyarakat telah dilaksanakan lebih awal dari jadwal melalui satu kali kegiatan sosialisasi dalam rangka penyusunan 16 draft RKPS di 9 KPH. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Selanjutnya, direncanakan pertemuan lanjutan di tingkat desa untuk pendampingan teknis penyusunan RKPS agar selaras dengan RPHJP disetiap KPH masing-masing.
- Implementasi output 4.1, dalam rangka tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan RBP REDD+ Output 2 Provinsi Riau, telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja (POKJA) REDD+. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi program, serta penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik terkait review Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pelaksanaan program sehingga implementasi dapat berjalan optimal, terarah, dan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan. Dalam rangka kegiatan monitoring dan input aksi mitigasi ke dalam SRN telah dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan konsolidasi pelaksana proyek RBP REDD+ Output 2 Provinsi Riau dengan tujuan meningkatkan pemahaman terhadap proyek serta melakukan finalisasi langkah-langkah implementasi guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan terdokumentasi dengan baik.

- Terkait aspek safeguard, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan sosial dan lingkungan telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik. Ketersediaan dokumen pendukung serta identifikasi risiko potensial menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk meminimalkan dampak sosial maupun lingkungan. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dilengkapi dan diperkuat, secara umum pelaksanaan Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau telah berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi ketentuan safeguard yang berlaku. Secara keseluruhan, implementasi proyek ini memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kesiapan kelembagaan REDD+ di tingkat provinsi, serta mendukung keberlanjutan upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan di Provinsi Riau.

Project Output	Project Activity	Indikator	Status	Implementation Progress (%)
Output 1.1 Menguatnya Perencanaan KPH dalam Pengelolaan Hutan	Aktivitas 1.1.2 Pertemuan KPH dengan Masyarakat. Pada tanggal 19, 23 dan 24 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan pertemuan KPH dengan Masyarakat dengan tema "Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS). Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi tahapan awal penyusunan RKPS melalui koordinasi, sosialisasi, dan pelibatan aktif para pihak, termasuk KPH, kelompok Perhutanan Sosial (PS), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat persiapan tingkat provinsi pada 19 Desember 2025 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang melibatkan unsur KPH, OPD, dan Lemtara untuk menyusun kerangka kerja, tahapan, serta pembagian peran dalam proses penyusunan RKPS. Selanjutnya, fasilitasi penyusunan RKPS dilaksanakan pada 23 dan 24 Desember 2025 di Pekanbaru dengan melibatkan perwakilan lima KPH (Kampar Kiri, Suligi Batu Gajah, Sorek, Singingi, Rokan), sembilan kelompok Perhutanan Sosial (LPHD Kenegerian Pangkalan Kapas, LD Tanjung Alai, KTH Simpang IV Koto, KTH Bobak, KTH Maju Bersama, KTH Kampar Jaya bersama, KTH Batang Ulak Jaya Bersama, KT Kuala Playau, HA Jake), delapan desa lokasi PS (Desa Pangkalan Kapas, Desa XIII Koto Kampar, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Mak Teduh, Desa Petai, Desa Balung, Desa Tambusai Utara, Desa Jake), serta OPD terkait. Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, para pihak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan, peran, dan manfaat RKPS, sekaligus menjadi wadah penjangkaran masukan awal dan kondisi spesifik di masing-masing wilayah sebagai dasar penyusunan dokumen RKPS yang kontekstual dan implementatif. 24% Perempuan terlibat aktif dalam pertemuan ditingkat provinsi, terdiri dari unsur OPD, KPH dan kelompok masyarakat. Setiap sesi diskusi, perwakilan gender diberikan kesempatan memberikan saran dan masukan sebagai bentuk penyaluran aspirasi. Setiap usulan Perempuan dimasukkan dalam dokumen rencana kerja.	9 laporan pertemuan KPH dengan masyarakat	On going	11%

 Tuesday, 23 December 2025 0° 31' 41" N, 101° 26' 56" E Jalan Sisingamangaraja No. 32 Kota Pekanbaru [Foto. Pertemuan dengan 9 kelompok Perhutanan Sosial untuk penyusunan dokumen RKPS]				
Output 4.1. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan REDD+ sub nasional Prov Riau	Aktivitas 4.1.2. Update Dokumen Rencana Aksi REDD+ Provinsi Riau	Tersediannya 1 Dokumen Update Rencana Aksi REDD+ yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau	On going	33%
	Aktivitas Update Dokumen Reencana Aksi REDD+ Provinsi Riau didukung oleh 5 sub kegiatan yaitu 4.1.2.1. Rapat POKJA REDD+, 4.1.2.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ dan Konsultasi Publik, 4.1.2.3. Rapat dan pertemuan FGD Rencana Aksi (Pengumpulan, Analisis Data, Pelaporan), 4.1.2.4. Koordinasi dan Konsultasi ke KLH/K, 4.1.2.5. Koordinasi dengan OPD. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 (dua) Sub kegiatan yaitu (4.1.2.1). Rapat POKJA REDD+ sebanyak 1 (satu) kali dan (4.1.2.2) Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan sub kegiatan tahun 2025 yang belum terealisasi akan direncanakan tahun berikutnya.		Capaian output masih dalam proses, pada tahun 2025 kegiatan 4.1.2.3 dan 4.1.2.4 belum terlaksana dan kegiatan 4.1.2.1 terlaksana 33% serta 4.1.2.2 tercapai 100%.	
	Sub Aktivitas 4.1.2.1. Rapat POKJA REDD+ Pada tanggal 10 Desember 2025 telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Riau dengan membahas rencana kerja serta kebutuhan data dalam penyusunan dokumen RAD REDD+ Provinsi Riau melalui metode partisipatif dan konsultatif. Rapat ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mitra pembangunan, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait lainnya serta Kementerian Lingkungan Hidup sebagai narasumber secara daring. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai kebijakan dan Urgensi Penyusunan RAD REDD+ di Tingkat Subnasional oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Bapak Solichin, Ph.D., selaku Konsultan	3 Kali Rapat Pokja	On going	33 %
			Capaian output masih dalam proses. Pada tahun 2025 tercapai 1 kali rapat Pokja dari 3 kali perencanaan. Proses realisasi akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.	

Penyusunan RAD REDD+ (KLH), dengan topik Metodologi dan Tahapan Penyusunan Dokumen RAD RED+ Subnasional dan Prof. Dr. Suwondo, M.Si. yang membahas Isu Strategis Implementasi REDD+ di Provinsi Riau. Partisipasi Perempuan mencapai 14 % dari unsur ASN, akademisi kampus dan Organisasi Masyarakat sipil (OMS) setiap masukan dan saran dari peserta dimasukkan dalam draft dokumen rencana aksi						
 10 Des 2025 11:59:31 0°30'9.282" N 101°25'40.818" E Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 28124 Indonesia [Foto. Rapat Pokja Penyusunan Rencana Kerja dan Identifikasi Kebutuhan Data RAD REDD+]						
Sub Aktivitas 4.1.2.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ Pada tanggal 18 November 2025 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik terkait Review RBP REDD+ output 2 yang ditujukan kepada internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mitra pembangunan hijau Provinsi Riau dengan tujuan memberikan informasi terkini mengenai proses dan perkembangan pelaksanaan program RBP antara lain, pengelolaan Kawasan hutan, review dokumen SRAP REDD+ dan penyampaian rencana tindak lanjut serta pemaparan oleh Yayasan Penabulu sebagai Lembaga perantara. Partisipasi Perempuan mencapai 21% dari unsur ASN, OMS dan Masyarakat. Utusan peserta berdasarkan surat tugas Lembaga masing-masing sesuai dengan keahliannya dan seluruh masukan dan saran dari peserta dimasukkan dalam laporan kegiatan.	1 Laporan sosialisasai REDD+	<table><tr><td>Tercapai</td><td>100 %</td></tr><tr><td colspan="2">Capaian output masih dalam proses pada tahun 2025 telah tercapai 1 laporan sosialisasi REDD+ Provinsi Riau, sesuai dengan rencana.</td></tr></table>	Tercapai	100 %	Capaian output masih dalam proses pada tahun 2025 telah tercapai 1 laporan sosialisasi REDD+ Provinsi Riau, sesuai dengan rencana.	
Tercapai	100 %					
Capaian output masih dalam proses pada tahun 2025 telah tercapai 1 laporan sosialisasi REDD+ Provinsi Riau, sesuai dengan rencana.						



[Foto. Koordinasi Teknis dan Sosialisasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau]

Sub Aktivitas 4.1.2.3. Rapat dan pertemuan FGD Rencana Aksi (Pengumpulan, Analisis Data, Pelaporan)	2 laporan FGD Rencana Aksi REDD+	Tertunda	0%
Masuk dalam rencana kerja tahun 2025 dengan target FGD Rencana Aksi REDD+ tetapi belum terlaksana		Target 2 kali FGD Rencana Aksi REDD+ masih tertunda. Proses realisasi akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	
Sub Aktivitas 4.1.2.4. Koordinasi dan Konsultasi ke KLH/K	1 laporan koordinasi dan konsultasi KLH/K	Tertunda	0%
Masuk dalam rencana kerja tahun 2025 dengan target koordinasi dan konsultasi KLH/K tetapi belum terlaksana		Target 1 kali koordinasi dan konsultasi KLH mengalami penundaan di tahun 2025. Realisasi akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.	
Aktivitas 4.1.5. Monitoring dan input aksi mitigasi ke dalam SRN	3 laporan monitoring dan/atau input aksi	On going	67 %
Pada tanggal 24-27 September 2025 telah dilaksanakan konsolidasi dan persiapan pelaksanaan proyek RBP REDD GCF Output 2 yang dihadiri tim Yayasan Penabulu di tingkat nasional. Kegiatan ini membahas pengenalan SOP, tata Kelola proyek, administrative, keuangan, dan safeguard. Dilakukan juga penyusunan rencana kerja semesteran dan triwulan tiap daerah.		Capaian output masih dalam proses Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam rangka monitoring, sedangkan 1 agenda pertemuan akan dilaksanakan pada tahun 2026.	
Pada tanggal 6 Oktober 2025 telah dilaksanakan kegiatan konsolidasi awal pelaksanaan program RBP REDD+ Output 2 dengan tujuan memfinalisasi langkah-langkah implementasi.		Sejalan dengan kegiatan tersebut, telah tersedia 2 (dua) laporan monitoring dari 3 laporan yang ditargetkan.	
Partisipasi Perempuan mencapai 38 % dari unsur ASN, Yayasan penabulu dan Tim RBP Provinsi Riau. Seluruh masukan dan saran dari peserta tercatat dalam draf laporan.			



[Foto. Konsolidasi dan Persiapan Pelaksanaan RBP REDD+ GCF Output 2 di Bogor]

Berikut disajikan perkembangan terbaru mengenai indikator dampak berdasarkan logical framework Provinsi Riau Tahun 2025.

Outcome	Indikator Outcome	Baseline	Means of Verification (MoV)	Capaian saat ini	Target (Mid-term)	Target (Final)
Outcome 1. Menguatnya Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Peningkatan Tata Kelola KPH	4 KPH dikelola berdasarkan pada RPHJP yang baik dan melibatkan masyarakat	Terdapat 13 UPT KPH, dimana Dokumen RPHJP 4 KPH masuk pada periode akhir/ belum melakukan penyesuaian RPHJP	LIST mov: • Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH,	Capaian kegiatan saat ini dengan 1 rapat persiapan pembahasan RKPS dan 1 pertemuan dengan 9 kelompok Perhutanan Sosial.	1.276.959 ha hutan wilayah kewenangan kerja KPH dikelola secara lestari dan berkelanjutan	4 KPH yang menjadi fokus wilayah intervensi adalah KPHP Minas Tahura, KPH Tebing Tinggi, KPH Bagansiapiapi, dan KPH Singingi dengan total luas 1.276.959 ha hutan wilayah kewenangan kerja dikelola secara lestari dan berkelanjutan
Outcome 2. Meningkatnya akses untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan	Jumlah masyarakat yang memperoleh Akses ke Sumber Daya Alam Melalui Skema Perhutanan Sosial atau Program Berkelanjutan Lainnya (hutan adat)	Jumlah Persetujuan PS di Riau pada Tahun 2023 sebanyak 142 Perhutanan Sosial dan Provinsi Riau memiliki sebanyak 141 KUPS (PPID 2023)	List MOV: • Data rumah tangga peserta program, • Dokumen persetujuan perhutanan sosial, dan • Laporan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam,	Pada Outcome 2, tidak ada kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025; seluruh rencana masih dalam proses dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.	135 masyarakat yang tergabung dalam 10 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Setidaknya 135 masyarakat yang tergabung dalam 10 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) mendapatkan akses dan manfaat dari pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari di kurang lebih 5.000 Ha area hutan.

Outcome 3. Mendukung Pencapaian Emisi GRK	Jumlah luasan tutupan hutan	Target akhir RIAU HIJAU sebesar 767.281 ha hutan konservasi	List MOV: • Perencanaan RHL, • Dokumentas • Laporan kegiatan,	Tidak ada kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025; seluruh rencana masih dalam proses dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.	Tutupan hutan bertambah 150 Ha	Bertambahnya tutupan lahan Provinsi Riau seluas 150 Ha dari kegiatan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan pada kawasan konservasi hutan/mangrove di wilayah kelola 9 KPH
Outcome 4. Menguatnya Kebijakan dan kelembagaan Untuk Implementasi REDD+	Menguatnya kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Implementasi REDD+ dari adanya 4 dokumen kebijakan yang terdiri dari (Dokumen FREL/FRL, SRAP, MRV, Benefit Sharing Plan, safeguard REDD+)	Prov. Riau belum memiliki FREL, sehingga perlu untuk dilakukan penyusunan FREL baru sesuai dengan karakteristik wilayah secara faktual Dokumen Rencana Aksi REDD+ Provinsi Riau yang pernah disusun pada Tahun 2010-2011 Dokumen safeguard dalam proses penyusunan melalui mekanisme kerjasama dengan UNEP.	List MOV: Dokumen REDD+ Provinsi Riau	Capaian output masih dalam proses, dengan sebagian rapat, sosialisasi, dan monitoring telah terlaksana sebagian.	Menguatnya kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Implementasi REDD+ dari adanya 4 dokumen kebijakan yang terdiri dari Dokumen FREL/FRL, SRAP, MRV, Benefit Sharing Plan, safeguard REDD+ level daerah di Provinsi Riau.	Menguatnya kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Implementasi REDD+ dari adanya 4 dokumen kebijakan yang terdiri dari Dokumen FREL/FRL, SRAP, MRV, Benefit Sharing Plan, safeguard REDD+ level daerah di Provinsi Riau.
Outcome 5. Penguatan dan implementasi NDC ditingkat Provinsi	Jumlah masyarakat yang tinggal di 11 kampung iklim berkomitmen mendukung upaya nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Data jumlah kampung iklim Di Provinsi Riau per 2022 adalah 283 Kampung Iklim	List MOV: • Laporan monev, • Daftar penerima manfaat, • Laporan kegiatan,	Pada Outcome 5, tidak ada kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025; seluruh rencana masih dalam proses dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	Sedikitnya 1.100 orang masyarakat yang tinggal di 11 kampung iklim berkomitmen mendukung upaya nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan sedikitnya 110 anggota proklamir/kader dalam aksi mitigasi dan	Sedikitnya 1.100 orang masyarakat yang tinggal di 11 kampung iklim berkomitmen mendukung upaya nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan sedikitnya 110 anggota proklamir/kader dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

					adaptasi perubahan iklim.	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

2.3 Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik

Pelaksanaan Proyek RBP REDD+ Output 2 di Provinsi Riau telah berjalan dan telah memberikan pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola, perencanaan, dan sinergi multipihak ke depannya. Berikut tantangan dan Pelajaran yang dapat dipetik untuk pelaksanaan tahun pertama:

Jenis	Tantangan Yang Dihadapi	Status Kondisi	Tindakan Yang Diambil	Dampak Terhadap Implementasi	Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dan Keterangan Lainnya
Program/ Kegiatan	Keterbatasan waktu, data time series dan SDM dalam penentuan FREL	Tinggi	Berkoordinasi dengan akademisi kampus kehutanan di Riau	Keaktifan akademisi kampus dalam proses penyusunan dokumen FREL	Perlu ketersediaan waktu, data time series dan SDM lebih awal sebelum kick-off meeting project
Program/ Kegiatan	Rendahnya Pemahaman tentang BRP REDD+ output 2 di Tingkat tim teknis dan Masyarakat	Sedang	Menyusun profil singkat project BRP REDD+ output 2	Meningkatnya pengetahuan tim teknis dan Masyarakat tentang BRP REDD+ output 2	Perlunya workshop dan sosialisasi dalam menyebarkan informasi tentang BRP REDD+ output 2.
Program/ Kegiatan	Kegiatan proyek dimulai pada akhir tahun 2025, Dimana hampir semua pelaksana/OPD fokus pada penyelesaian kegiatan dan pelaporan (APBD).	Sedang	Penyesuaian kegiatan yang telah direncanakan	Beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan pada awal proyek tidak dapat terlaksana.	Pengaturan dan penjadwalan kegiatan harus melihat dinamika OPD ditingkat provinsi, terutama pada akhir tahun fiskal.
Pengadaan	Risiko Keterlambatan Proses	Rendah	Proses Lelang lebih awal	Perlu perubahan dokumen pengadaan	Pengadaan jasa dan barang sebaiknya lebih awal dilaksanakan, terkhususnya bibit pohon dan pendukung pertumbuhan.
Pengadaan	Kapasitas pengelola pengadaan	Kecil	Melakukan konsultasi	Meningkatnya kapasitas pengelola	Pedoman teknis pengadaan mampu menjadi acuan proses pengadaan
Safeguard	Rendahnya keterlibatan perempuan	Tinggi	Mendorong keterlibatan (utusan) perempuan disetiap kegiatan	Meningkatnya kehadiran perempuan pada pertemuan ditingkat desa.	Peran perempuan sangat signifikan disetiap kegiatan, namun terhalan administrasi
Safeguard Proyek	Masih lemahnya pemahaman pelaksana/OPD bawah safeguard menjadi bagian	Kecil	Mendampingi dan mengingatkan pelaksana/OPD dalam penerapan safeguard proyek.	Dampak terkait pemahaman ini tidak signifikan, mengingat proses intervensi dari Lemtara telah dilakukan	Perlu melakukan integrasi antara safeguard proyek ke dalam kegiatan-kegiatan OPD pelaksana.

	rangkaian kegiatan dalam proyek.			seperti mendampingi dan mengingatkan kebutuhan kewajiban safeguard proyek.	
Safeguard	Ketersediaan dokumen MOV	Tinggi	Melakukan koordinasi rutin	Kelengkapan administrasi meningkat	Penentuan indikator keluaran setiap kegiatan dan penanggungjawab.
Keuangan	Ketaatan dan kepatuhan OPD pelaksana terkait SOP keuangan dan standar administrasi yang telah ditentukan masih ada yang belum sesuai, seperti pertanggung jawaban transportasi (nilai yang tidak sesuai dengan PMK dan bukti pertanggung jawaban).	Sedang	Menegakkan prosedur dan mengingatkan OPD terkait standar yang digunakan.	Keterlambatan (revisi) dalam proses pertanggung jawaban keuangan dari OPD pelaksana.	Adanya dinamika keuangan ini, dibutuhkan proses pengawalan dan ketelitian dari proses pertanggung jawaban. Dan pada tingkatan OPD, dibutuhkan PIC khusus yang bertanggung jawab terkait administrasi dan keuangan.
Keuangan	Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang cenderung "mendadak" sehingga proses penyiapan administrasi cenderung terburu buru dan sebagian kegiatan menggunakan mekanisme reimburse.	Sedang	Tetap memproses kegiatan dan mengawal proses pertanggung jawaban laporan keuangan	Keterlambatan (revisi) dalam proses pertanggung jawaban keuangan dari OPD pelaksana.	Adanya dinamika keuangan ini, dibutuhkan proses pengawalan dan ketelitian dari proses pertanggung jawaban. Dan pada tingkatan OPD, dibutuhkan PIC khusus yang bertanggung jawab terkait administrasi dan keuangan.

3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender

- Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDH. Sepanjang periode Oktober-Desember 2025, pelaksanaan program difokuskan pada fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) bagi sembilan kelompok masyarakat di beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta proses pembaruan Dokumen Rencana Aksi REDD+ Provinsi Riau melalui pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) dan kegiatan sosialisasi program RBP. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prov Riau serta peningkatan kapasitas para pihak dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPDH.
- Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025

tidak terdapat pengaduan resmi yang masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh Masyarakat maupun pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

- Keterlibatan gender tercatat sebanyak 270 orang, terdiri dari 204 laki-laki (76%) dan 66 perempuan (24%). Meskipun partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam sosialisasi penyusunan dokumen RKPS, serta kegiatan pertemuan Pokja.

Kegiatan	Mitra / Pemangku Kepentingan	Peran Stakeholder dalam Pelaksanaan Program
1.1.2. Pertemuan KPH dengan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Sebagai penanggungjawab pemerintahan di Tingkat provinsi.
	Kepala KPH : 1. KPH Kampar Kiri, 2. KPH Suligi Batu Gajah, 3. KPH Sorek, 4. KPH Singingi, 5. KPH Rokan	Sebagai pelaksana dan narasumber
	Tim Kerja Seksi penyuluhan dan Perhutanan Sosial	Sebagai pelaksana kegiatan
	Perwakilan 9 Kelompok Perhutanan Sosial : 1. PHD Kenegerian Pangkalan Kapas, 2. LD Tanjung Alai, 3. KTH Simpang IV Koto, 4. KTH Bobak, 5. KTH Maju Bersama, 6. KTH Kampar Jaya bersama, 7. KTH Batang Ulak Jaya Bersama, 8. KT Kuala Playau, 9. HA Jake	Sebagai peserta dan penerima manfaat proyek RBP REDD+ Output 2
	Perwakilan Kepala Desa 8 Desa lokasi Perhutanan Sosial 1. Desa Pangkalan Kapas,	Sebagai peserta dan penanggung jawab pemerintahan di tingkat desa

	2. Desa XIII Koto Kampar, 3. Desa Cipang Kiri Hulu, 4. Desa Mak Teduh, 5. Desa Petai, 6. Desa Balung, 7. Desa Tambusai Utara, 8. Desa Jake	
	Yayasan Penabulu	Sebagai peserta
4.1.2.1 Rapat POKJA REDD+	Pemerintah pusat (KLH)	Sebagai narasumber kegiatan
	Dinas LHK Provinsi Riau	Sebagai pelaksana kegiatan dan narasumber
	Pemerintah daerah	Sebagai pelaksana kegiatan pertemuan
	NGO	Sebagai peserta kegiatan dan sumber informasi
	Akademisi	Sebagai narasumber dan tim pokja
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara dan peserta.
4.1.2.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ dan Konsultasi Publik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Pelaksana kegiatan dan penanggungjawab proyek
	Kepala KPH : 1.KPH Minas Tahura, 2.KPH Sorek, 3.KPH Mandau, 4.KPH Kampar Kiri, 5.KPH Singingi, 6.KPH Indragiri, 7.KPH TBS, 8.KPH Rokan, 9.KPH Suligi Batu Gajah	Sebagai pelaksana kegiatan dalam implementasi RBP GCF Output 2 Provinsi Riau
	Lembaga Swadaya Masyarakat	Sebagai Narasumber dan Mitra Pembangunan Provinsi Riau

	Universitas	Sebagai narasumber dan mitra Pembangunan Provinsi Riau
	Yayasan Penabulu	Lembaga perantara dan pelaksana kegiatan
4.15. Monitoring dan input aksi mitigasi ke dalam SRN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan.
	Yayasan Penabulu	Sebagai pelaksana kegiatan persiapan implementasi kegiatan

4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Pada tahun 2025, sejumlah kegiatan program telah menunjukkan kemajuan meskipun sebagian besar masih dalam proses realisasi. Telah dilaksanakan 1 rapat Pokja dari target 3 kali, serta 1 rapat persiapan pembahasan RKPS dan 1 pertemuan dengan 9 kelompok Perhutanan Sosial untuk mendukung penyusunan RKPS. Dalam rangka sosialisasi REDD+ telah tersusun 1 laporan kegiatan Provinsi Riau, sementara 2 FGD Rencana Aksi REDD+ masih tertunda dan menjadi fokus lanjutan. Untuk kegiatan monitoring, 2 dari 3 pertemuan telah terlaksana dengan 2 laporan monitoring yang tersedia, sehingga masih ada 1 agenda pertemuan dan 1 laporan yang akan diselesaikan.

Hambatan lain muncul dalam tahap pelaksanaan, terutama pada proses menerjemahkan perencanaan dalam proposal yang masih bersifat umum menjadi kebutuhan implementasi yang rinci di tingkat tapak. Penentuan lokus kegiatan membutuhkan verifikasi, klarifikasi, dan pendalaman data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta sesuai kondisi lapangan. Konsekuensinya, proses berjalan lebih panjang karena harus melalui tahapan penetapan prioritas, pemenuhan persyaratan teknis, serta mekanisme persetujuan dari para pihak terkait sebelum kegiatan dapat dieksekusi. Pada saat yang sama, penerapan pendekatan partisipatif PADIATAPA—sebagai prasyarat penting sebelum penanaman—memerlukan waktu yang lebih panjang untuk membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan dengan masyarakat.

Pada Tahun 2025 ini tercatat partisipasi sebanyak 270 orang, terdiri dari 204 laki-laki (76%) dan 66 perempuan (24%). dari berbagai unsur, dan seluruh saran serta masukan mereka dicatat dalam dokumen rencana kerja, rencana aksi, maupun draft laporan, menunjukkan aspirasi dan perspektif gender telah terakomodasi dalam perencanaan dan evaluasi program.

Tindak lanjut pada tahun 2026 akan difokuskan pada penyelesaian rapat Pokja yang tersisa, pelaksanaan FGD Rencana Aksi REDD+, rapat koordinasi OPD Provinsi Riau, serta pertemuan dan laporan monitoring yang belum terlaksana. Selain itu, kegiatan pendukung lain yang masih dalam tahap perencanaan, seperti penguatan kapasitas kelompok Perhutanan Sosial dan penyempurnaan dokumen RKPS, juga akan dilaksanakan untuk memastikan seluruh target program dapat tercapai secara menyeluruh.



Lampiran

Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program Provinsi Riau dalam Excel

[Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program_KP II_\(Riau\).xlsx](#)

Lampiran 2. Link Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan (Link Google Drive)

Kode Kegiatan	Link Dokumen
1.1.2	https://drive.google.com/drive/folders/1pi943hEyPAblbJcz5e4GRgKNbbM8LBzd?usp=drive_link
4.1.2.1	https://drive.google.com/drive/folders/1bXbjnm_HemfjffQLbWopp5i2kYhjU8Zq?usp=drive_link
4.1.2.2	https://drive.google.com/drive/folders/1GW1F7EL8uX8ciD77C8qiHKp9ZendUrnu?usp=drive_link
4.1.5	https://drive.google.com/drive/folders/1xT_Bkys_OgFe394nJJFIV10QeXUF5nJd?usp=drive_link